

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KELURAHAN GEMAH KECAMATAN PEDURUNGAN
SEMARANG**

RESUME SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi persyaratan pengambilan transkrip nilai
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang**

Penyusun

Nama : D2A604020_Daryumi

Nim :

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan dalam bukunya Sufri Nurmantu yang berjudul Perpajakan Merumuskan tentang Pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”(Nurmantu, 2003 : 12).

Menurut UU No 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan dan bersifat langsung dimana wajib pajak tidak bisa memindahkan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan kepada orang lain. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, berarti meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanami atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan, yang termasuk sebagai bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah

- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Gambaran penerimaan pajak dari target yang ditentukan tiap tahun pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan PBB Per September Tiap Tahun
Dikecamatan Pedurungan Tahun 2004 - 2006

No	Tahun	Target		Realisasi		Persen
		SPPT	Jml / Rp	SPPT	Jml / Rp	
1	2006	48.118	5.870.950.500	21.995	3.153.913.307	45,71
2	2005	47.488	4.425.447.876	33.118	3.305.436.664	69,74
3	2004	46.127	3.557.997.396	32.677	2.645.341.992	70,84

Sumber : Perbandingan Realisasi PBB Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 menuju 2006 realisasi penerimaan pajak jatuh tempo mengalami penurunan. Adapun penyebabnya antara lain :

- a. Belum efektifnya komunikasi dan sikap petugas kepada masyarakat
- b. Rendahnya sosialisasi tentang PBB secara langsung
- c. Sistem antrean yang tidak efektif
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
- e. Kualitas pelayanan yang belum optimal

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan melihat keadaan yang terjadi di lapangan, Akhirnya dapat disimpulkan judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBB DI KELURAHAN GEMAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG”**

b. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan PBB yang diduga disebabkan oleh lemahnya faktor komunikasi dan sikap pelaksana”.

c. Teori yang Mendasari

Mengacu pada konsep implementasi kebijakan yang beraneka ragam, penelitian ini mendasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh George C. Edwards sebagai landasan utama teori dan konsep dari Van Metter dan Van Horn sebagai teori pendukung.

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi, antara keempat variabel tersebut saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

Selain Edwards, Van Metter dan Van Horn juga menyebutkan ada 6 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut antara lain:

1. Ukuran standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatory atau penjelasan dan mengambil populasi semua Wajib Pajak Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan

sebanyak 3.338 wajib pajak, dan diambil sample sebanyak 50 orang. Didalam penelitian ini pengambilan sample yang digunakan adalah teknik random sampling, khususnya Teknik Proposional random sampling, dimana semua individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sample.

HASIL PENELITIAN

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel frekuensi/analisis suatu variabel yang meliputi identitas responden, variabel implementasi kebijakan PBB, variabel komunikasi dan variabel sikap.

A. Identitas Responden

Sebelum penyajian data terlebih dahulu akan disajikan identitas responden dalam penelitian ini. Identitas responden yang akan diuraikan meliputi umur, pekerjaan, pendidikan dan jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang.

Tabel III.1
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Prosentase (%)
1	21 – 30	5	10
2	31 – 40	10	20
3	41 – 50	25	50
4	51 – 60	5	10
5	61 - 70	5	10
	Total	50	100

Sumber : Diolah dari Kues I

Tabel diatas menunjukkan bahwa umur responden dibagi menjadi 5 kelompok umur. Kelompok terbesar yaitu kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 25 responden

(50%) dan kelompok terkecil pada umur 21-30 tahun sebanyak 5 responden (10%), kelompok umur 51-60 tahun sebesar 5 responden (10%) dan kelompok umur 61-70 tahun sebesar 5 responden (10%). Pada kelompok umur 31-40 tahun terdapat 10 responden (20%). Kelompok terbesar pada umur 41-50 tahun merupakan umur yang masih produktif. Berikut ini data responden menurut tingkat pekerjaan :

Tabel III.2
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Buruh tani	2	4
2	Pengusaha	5	10
3	Buruh industri	20	40
4	Pedagang	15	30
5	Pegawai Negeri	8	16
	Total	50	100

Sumber : Diolah dari Kues I

Dari tabel diatas terdapat 5 jenis pekerjaan, kelompok pekerjaan yang terbesar yaitu pada jenis pekerjaan buruh industri sebesar 20 responden (40%) dan kelompok terkecil pada jenis pekerjaan buruh tani yaitu sebesar 2 responden (4%), untuk pengusaha sebesar 5 responden (10%), pedagang sebesar 15 responden (30%) dan pegawai negeri sebesar 8 responden (16%). Berikut ini data responden menurut tingkat pendidikan.

Tabel III.3
Distribusi Responden Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Perguruan Tinggi	5	10
2	Tamat SLTA	18	36
3	Tamat SLTP	10	20
4	Tamat SD	8	16
5	Tidak Tamat SD	9	18
	Total	50	100

Sumber : Diolah dari Kues I

Pada tabel diatas mengenai pendidikan, pendidikan responden bervariasi dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, pendidikan terbesar berada pada tamatan SMA yaitu sebesar 18 responden (36%) dan pendidikan terkecil pada tamatan perguruan tinggi sebesar 5 responden (10%). Berikut ini data responden menurut jenis kelamin :

Tabel III.4
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	30	60
2	Perempuan	20	40
	Total	50	100

Sumber : Diolah dari Kues I

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sejumlah 30 responden (60%) dan berjenis kelamin perempuan adalah 20 orang (40%).

B. Implementasi Kebijakan

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai tertinggi variabel Implementasi Kebijakan adalah sebesar 53 dan nilai terendah sebesar 32. untuk mengetahui kategori nilai total dari implementasi kebijakan, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K} = \frac{53 - 32}{4} = \frac{21}{4} = 5.25$$

Sesuai pertanyaan no.1-16, maka akan diketahui rekapitulasi data variabel implementasi berdasarkan klasifikasi yang disajikan seperti berikut ini :

Tabel III. 21
Tingkat Implementasi Kebijakan

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Tinggi	13	26
2	Tinggi	18	36
3	Kurang Tinggi	15	30
4	Rendah	4	8
	Total	50	100

Sumber : Berdasarkan Frequency Table SPSS

Tabel rekapitulasi implementasi kebijakan diatas memperlihatkan ada sebanyak 13 Responden (26%) wajib pajak PBB di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan sudah sangat tinggi dan 18 Responden (36%) menyatakan tinggi, adapun yang menyatakan kurang tinggi yaitu sebesar 15 responden (30%) dan sebanyak 4 responden (8%) menyatakan rendah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan tergolong tinggi.

Responden menjawab tinggi berarti masyarakat mendukung adanya kebijakan PBB mereka yakin dengan adanya PBB maka akan bermanfaat bagi wajib pajak sehingga responden mematuhi untuk membayar PBB tepat waktu namun bagi responden yang menjawab dalam kategori rendah dan kategori kurang tinggi terlihat bahwa mereka kurang mendukung kebijakan PBB, hal ini dibuktikan bahwa masih ada sebagian wajib pajak yang belum membayar pajak dengan tepat waktu atau jatuh tempo, mereka jatuh tempo dalam membayar pajak karena mereka belum mendapatkan manfaat yang diberikan pemerintah dalam membayar pajak.

C.Variabel Komunikasi

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai tertinggi variabel Komunikasi adalah sebesar 48 dan nilai terendah sebesar 31. untuk mengetahui kategori nilai total dari Komunikasi, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K} = \frac{48 - 31}{4} = \frac{17}{4} = 4.25$$

Sesuai pertanyaan no.16-30, maka akan diketahui rekapitulasi data variabel komunikasi berdasarkan klasifikasi yang disajikan seperti berikut ini :

Tabel III. 35
Tingkat Komunikasi

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Tinggi	11	22
2	Tinggi	12	24
3	Kurang Tinggi	21	42
4	Rendah	6	12
	Total	50	100

Sumber : Berdasarkan Frequency Table SPSS

Tabel rekapitulasi komunikasi diatas memperlihatkan ada sebanyak 11 responden (22%) menjawab sangat tinggi dan sebanyak 12 responden (24%) menjawab tinggi sedangkan yang menjawab kurang tinggi sebesar 21 responden (42%) dan 6 responden (12%) menjawab rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan tergolong kurang tinggi.

Responden menjawab komunikasi kurang tinggi karena komunikasi antara petugas dengan wajib pajak belum terjalin dengan baik, para petugas jarang memberikan penyuluhan secara langsung sehingga intensitas bertemunya jarang, selain itu petugas dalam menyampaikan informasi kurang jelas dan masih terkesan kaku sehingga wajib pajak juga kurang paham dan petugas enggan menjawab dengan komplit jika ditanya oleh wajib pajak.

D. Variabel Sikap

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai tertinggi variabel Sikap adalah sebesar 48 dan nilai terendah sebesar 32. untuk mengetahui kategori nilai total dari Sikap, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K} = \frac{48 - 32}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

Sesuai pertanyaan no.31-45, maka akan diketahui rekapitulasi data variabel Sikap berdasarkan klasifikasi yang disajikan seperti berikut ini :

Tabel III. 51
Tingkat Sikap

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Tinggi	17	34
2	Tinggi	13	26
3	Kurang Tinggi	18	36
4	Rendah	2	4
	Total	50	100

Sumber : Berdasarkan Frequensy Table SPSS

Tabel rekapituilasi variabel sikap memperlihatkan bahwa terdapat 17 responden (34%) menjawab sangat tinggi wajib pajak di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan dan sebesar 13 responden (26%) menjawab tinggi sedangkan yang menjawab kurang tinggi sebesar 18 responden (36%) dan yang menjawab rendah sebesar 2 responden (4%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sikap di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan tergolong kurang tinggi.

Sebagian besar responden menjawab kurang tinggi karena responden menilai bahwa cara kerja petugas pemungutan PBB di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari para petugas yang sering terlambat datang ke kantor dan keluar kerja disaat jam kantor, selain itu petugas pulang awal dari jam kerja yang telah ditentukan, sehingga wajib pajak merasa kurang diberi pelayanan yang memuaskan.

Sesuai dengan ketentuan dalam uji statistik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif komunikasi terhadap implementasi kebijakan **dapat diterima**, selanjutnya untuk mengetahui hubungan komunikasi (X1) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus seperti dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= \tau^2 \cdot 100\% \\
 &= (0,378)^2 \cdot 100\% \\
 &= 14,29\%
 \end{aligned}$$

Sesuai hasil perhitungan Koefisien determinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai KD yang diperoleh menunjukkan bahwa pada variabel implementasi kebijakan (Y) terjadi perubahan besar 14,29% yang disebabkan oleh variabel komunikasi (X1) sedangkan besarnya 85,71% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sikap, sumber daya manusia, lingkungan ekonomi dan lain sebagainya sehingga tidak hanya komunikasi dari petugas yang mendeterminasikan implementasi kebijakan.

A.2. Analisis Korelasi Rank Kendall Sikap dan Implementasi Kebijakan

Tabel III.1

Uji Korelasi Antara Variabel Sikap (X2) dengan Variabel Implementasi Kebijakan (Y) Nonparametric Correlation

Correlations				
		X2	Y	
Kendall's tau_b	X2	Correlation Coefficient	1.000	.515**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	Y	Correlation Coefficient	.515**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

** . Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Analisis yang menggunakan perhitungan SPSS dihasilkan nilai $\tau = 0,515$, artinya bahwa yang dimiliki oleh komunikasi dengan implementasi kebijakan adalah positif, hasil perhitungan koefisien korelasi Rank Kendall tersebut kemudian diuji signifikansinya dengan menggunakan uji Z dengan perhitungan berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+1)}{9N(N-1)}}} \quad Z = \frac{0.515}{\sqrt{\frac{2(2.50+1)}{9.50(50-1)}}} \quad Z = \frac{0.515}{\sqrt{\frac{202}{22050}}} \quad Z = \frac{0.515}{\sqrt{0.00916}}$$

$$Z = \frac{0.515}{0.095708} \quad Z = 5,38$$

Harga Z kemudian dikonsultasikan dengan harga Z tabel dengan taraf signifikan 1%. Harga Z pada taraf signifikan 1% menunjukkan angka 2,58 sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel pada taraf signifikan sehingga 1% yaitu

$$\text{Taraf signifikansi 1\% : } Z \text{ hitung} > Z \text{ tabel atau } 5,38 > 2,58$$

Sesuai dengan ketentuan dalam uji statistic, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif Sikap terhadap implementasi kebijakan **dapat diterima**, selanjutnya untuk mengetahui hubungan Sikap (X2) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus seperti dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= \tau^2 \cdot 100\% \\ &= (0,515)^2 \cdot 100\% \\ &= 26,52\% \end{aligned}$$

Sesuai hasil perhitungan Koefisien determinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai KD yang diperoleh menunjukkan bahwa pada variabel implementasi kebijakan (Y) terjadi perubahan besar 26,52% yang disebabkan oleh variabel Sikap (X2) sedangkan besarnya 73,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Komunikasi, sumber daya manusia, lingkungan ekonomi dan lain sebagainya sehingga tidak hanya Sikap dari petugas yang mendeterminasikan implementasi kebijakan.

A.3. Hubungan Komunikasi dan Sikap dengan Implementasi Kebijakan

Tabel III.1

**Uji Konkordasi Kendall
antara Komunikasi (X1) dan Sikap (X2)
terhadap Implementasi Kebijakan (Y)**

Test Statistics

N	50
Kendall's W ^a	.461
Chi-Square	46.054
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Analisis dengan perhitungan program SPSS diketahui bahwa $W = 0,461$ sebagai koefisien konkordasi kendall. Untuk uji signifikansi W pada sampel ($N > 1$) dapat digunakan nilai κ^2 melalui rumus Chi kuadrat sebagai berikut :

$$\kappa^2 = K (N-1) \cdot W$$

$$\kappa^2 = 3 (50-1) \cdot 0,461$$

$$= 67,77$$

Kemudian harga κ^2 dikonsultasikan dengan harga kritik chi kuadrat dengan derajat kebebasan $db = N-1$ yaitu $50-1$ pada taraf signifikansi 5%. Harga kritis tabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan angka 55,75 dari hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa nilai hitung $\kappa^2 > \kappa^2$ tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu :

$$\text{Taraf signifikansi 5\%} = \kappa^2 \text{ hitung} > \kappa^2 \text{ tabel atau } 67,77 > 55,75$$

Sesuai analisis data diatas, maka hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel komunikasi dan sikap terhadap implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan **dapat diterima**.

Besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dapat diketahui melalui rumus koefisien determinasi (KD) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= W^2 \times 100\% \\ &= (0,461)^2 \times 100\% = 21,25\% \end{aligned}$$

Sesuai perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berubah sebesar 67,77 sebagai akibat adanya hubungan dengan variabel komunikasi dan variabel sikap serta pengaruh lainnya sebesar 32,23

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Implementasi Kebijakan (Y)

Implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan tergolong tinggi, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan banyak kekurangan antara lain komunikasi yang belum lancar dan sikap wajib pajak yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan, hal ini disebabkan karena beberapa wajib pajak merasa pemungutan PBB belum memberikan manfaat kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan membayar pajak kepada negara.

b. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan petugas pemungut pajak di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan kurang tinggi karena petugas dalam menyampaikan informasi kurang dimengerti oleh wajib pajak sehingga wajib pajak belum jelas dan masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan mengakibatkan wajib pajak kurang paham akan kebijakan PBB dan hal inilah yang mengakibatkan wajib pajak jatuh tempo dalam membayar pajak. Komunikasi yang disampaikan petugas pemungut pajak juga masih terasa kaku dan responden menilai para petugas hanya memberikan informasi yang seperlunya saja tanpa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai PBB.

c. Sikap

Dari hasil rekapitulasi variabel diketahui bahwa sebesar 17 responden (34%) menjawab sangat tinggi dan sebesar 13 responden (26%) menjawab tinggi, sedangkan yang menjawab kurang tinggi sebesar 18 responden (36%) dan yang menjawab rendah sebesar 2 responden (4%)

Kurang maksimalnya sikap dari para petugas, misalnya loket pembayaran tidak dibuka tepat waktu, sistem antrian yang panjang, petugas yang kurang disiplin, hanya terdapat satu loket pembayaran, hal ini yang menyebabkan wajib pajak sebagian besar harus menunggu lama dan akhirnya malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus statistik koefisien Rank Kendall dan Koefisien Konkordasi Kendall, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan implementasi kebijakan dibuktikan dari hasil $\tau = 0,378$ dan $Z = 3,95$ ternyata dengan uji signifikan 1% harga Z hitung 3,95 lebih besar dari pada harga Z tabel 2,58 pada taraf signifikan 1%. dengan demikian hipotesis dapat diterima. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan digunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan $KD = 14,29$ hal ini menunjukkan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebesar 14,29 dan sisanya sebesar 85,71 dipengaruhi oleh faktor lain.
- b. Ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap dengan implementasi kebijakan dibuktikan dari hasil $\tau = 0,515$ dan $Z = 5,38$ ternyata dengan uji signifikan 1% harga Z hitung 5,38 lebih besar dari pada harga Z tabel 2,58 pada taraf signifikan 1%. dengan demikian hipotesis dapat diterima. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara sikap terhadap implementasi kebijakan digunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan $KD = 26,52$ hal ini menunjukkan sikap berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebesar 26,52 dan sisanya sebesar 73,48 dipengaruhi oleh faktor lain

- c. Ada hubungan yang signifikan antara komunikasi dan sikap terhadap implementasi kebijakan dibuktikan dari hasil koefisien konkordansi kendall (W) yang menunjukkan angka W sebesar 0,461 dan uji signifikansi κ^2 menghasilkan nilai κ^2 sebesar 67,77 kemudian ini dikonsultasikan dengan κ^2 tabel dengan taraf signifikan 5% = 55,75 menunjukkan bahwa κ^2 67,77 > κ^2 tabel 5% = 55,75 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima.
- d. Besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat diketahui melalui rumus koefisien determinasi (KD) yakni sebesar 21,25 maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berubah sebesar 21,25 sebagai akibat adanya pengaruh komunikasi dan sikap serta pengaruh variabel lainnya sebesar 78,75

2. Saran

Berikut ini terdapat beberapa saran yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan, antara lain sebagai berikut :

1 Implementasi Kebijakan

- a. Memberikan penyuluhan mengenai isi dan tujuan kebijakan agar wajib pajak paham akan kebijakan PBB.
- b. Meningkatkan kinerja petugas berupa keterlibatan petugas dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kebijakan.
- c. Lebih sering melibatkan masyarakat dalam menjalankan kebijakan agar masyarakat ikut berpartisipasi.
- d. Memberikan hasil yang maksimal setelah membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa saran dapat digunakan dalam kelancaran berkomunikasi, yaitu antara lain

2 Komunikasi

- a. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak secara teratur agar wajib pajak benar-benar paham mengenai kebijakan pajak
- b. Lebih meningkatkan kedekatan kepada wajib pajak agar terjalin komunikasi yang lancar
- c. Membagikan Informasi kepada wajib pajak secara menyeluruh jangan hanya setengah-setengah

Beberapa saran yang digunakan untuk memperbaiki sikap di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan, antara lain :

3 Sikap

- a. Memperhatikan tempat pembayaran dan prosedur pembayaran agar tidak lambat dalam menangani wajib pajak dalam membayar
- b. Lebih meningkatkan kedisiplinan para petugas pemungut pajak.
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Chairul A.2, Tubagus. 1992. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, N. William. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Yudhistira.
- Nawawi, hadari dan Martini, mimi. 1994. *Penelitian terapan*. Yogyakarta : gajah Mada University Press.
- Nogi, Hessel. 2005. *Kebijakan dan Managemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Nogi, Hessel. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia

